BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM NORMALISASI HUBUNGAN PERDAGANGAN AMERIKA SERIKAT DAN VIETNAM

B. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan historis, Vietnam merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki riwayat penjajahan yang cukup panjang. Wilayah ini pernah dikuasai Cina selama puluhan abad di masa lampau sehingga kultur politik Cina (sosialis-komunis) sangat kuat. Kemudian di era imperialisme modern, Vietnam menjadi wilayah jajahan negara Eropa diantaranya Perancis. Perancis mulai menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indocina. Ekspansi kekuasaan Perancis disebabkan keinginannya untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah guna menggerakkan industri di Perancis.

Dan di tahun 1954, nasionalis Vietnam berjuang untuk kemerdekaan penuh mengalahkan Perancis. Dari semangat ingin memerdekakan diri ini terjadilah pertempuran pasukan nasionalis Vietnam melawan Perancis. Perang ini dikenal dengan Pertempuran Dien Bien Phu. Pertempuran Dien Bien Phu adalah pertempuran final dalam perang Indocina babak pertama

antara Perancis dan Revolusioner Vietnam (Viet Minh). Pertempuran ini terjadi antara Maret dan Mei 1954, dan berakhir dengan kekalahan Militer Perancis secara besar-besaran dan memalukan yang akhirnya menyudahi peperangan tersebut. Pasukan Infanteri Viet Minh mengibarkan bendera kemenangan di Dien Bien Phu.

Hasil dari serangkaian kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan Perancis ialah bahwa Perancis berusaha menciptakan sebuah basis pemasokan lewat udara di Dien Bien Phu, jauh di daerah perbukitan Vietnam. Tujuannya adalah untuk memotong jalur pasokan Viet Minh ke Laos. Sebaliknya, Viet Minh di bawah Jenderal Vo Nguyen Giap, sanggup mengitari dan mengepung Perancis. Pecahlah pertarungan sengit di darat. Viet Minh menduduki daerah perbukitan di sekitar Dien Bien Phu, dan mampu menembak ke bawah secara akurat ke posisi tentara-tentara Perancis. Pasukan Perancis berulang-ulang membalas serangan-serangan Viet Minh di posisi-posisi mereka, dengan sesekali menerjunkan pasukan-pasukan tambahan. Namun pada akhirnya Viet Minh berhasil merebut

Gambar 1.1 Kekalahan Perancis Di Dien Bien Phu

Setelah pertempuran ini, perang berakhir dengan persetujuan Jenewa tahun 1954. Persetujuan ini membagi Vietnam menjadi dua wilayah yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Namun demikian perdamaian yang singkat itu segera berantakan. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1957 yang dikenal dengan Perang Vietnam atas dasar basis ideologi. Perang Vietnam ini merupakan salah satu hasil dari intervensi asing yaitu Amerika Serikat dalam konflik antara kedua wilayah ini. Perang Vietnam ini menjadi perang nyata yang terjadi saat itu ketika dunia diwarnai dengan perang dingin antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) dalam penanaman pengaruh ideologi masing-masing.

Perang Vietnam, yang disebut juga Perang Indocina Kedua adalah sebuah perang yang terjadi antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu Komunis dan Liberal. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik

Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan USSR (Uni Soviet) dan Tiongkok mendukung Vietnam Utara yang merupakan negara komunis.[1]

Perang ini berawal dari Perang Saudara (*Civil War*) menjadi konfilk internasional yang pada akhirnya melibatkan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada saat itu berusaha untuk menghentikan penyebaran ideologi komunis. Perang ini menjadi salah satu konflik pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan sekutunya menentang Uni Soviet dan sekutunya. Perang seperti ini disebut sebagai Perang Proksi karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri tidak pernah bersemuka secara terang-terangan di medan pertempuran karena khawatir akan meletuskan perang nuklir.

Kebijakan Amerika Serikat untuk terlibat dalam Perang Vietnam, dipicu oleh sikap paranoid Amerika terhadap orang-orang komunis, sebuah keganasan yang konon hanya dimaksudkan untuk mencegah efek domino persebaran Komunisme di Asia Tenggara. Kebijakan ini terus mewarnai Pemerintahan Amerika Serikat dari masa Dwight D. Eisenhower (1953-1961), John F. Kennedy (1961-1963), Lyndon B. Johnson (1963-

[1] "Perang Vietnam", diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam, pada tanggal 29

1969), hingga Richard M. Nixon (1969-1974), dan baru berakhir di era Gerald R. Ford (1974-1977).[2]

Pada 1 November 1955, Dwight D. Eisenhower yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada saat itu mengirim rombongan pasukan "penasihat tentara" yang disebut Kumpulan Bantuan Penasihat Tentara *(Military Assistance Advisory Group / MAAG)* ke Vietnam Selatan untuk memberikan latihan kepada Tentara Vietnam Selatan (ARVN) dalam menentang komunis. Ini merupakan permulaan campur tangan resmi Amerika Serikat di dalam perang Vietnam. Pada 8 Juli 1958, Charles Ovnand and Dale R. Buis menjadi anggota MAAG pertama terbunuh semasa bertugas di Vietnam.[3]

Gambar 1.2 Pasukan Amerika Serikat Mendarat Di Vietnam

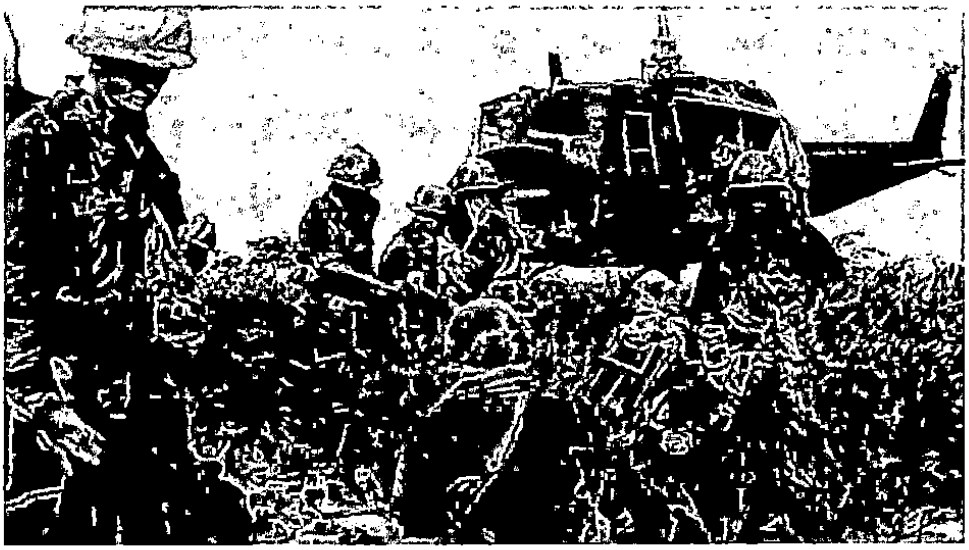

Pada akhir 1963, Amerika Serikat mengirimkan 16.300 orang tentara serta bantuan senilai US$ 500 juta. Namun demikian, tentara Amerika

[2] Neeta Takky, "Perang Vietnam", diakses dari www.neetatakky.blogspot.com, pada tanggal 29 Oktober 2013.

[3] "Perang Vietnam: Perang yang Tidak Diinginkan oleh Amerika Serikat", diakses dari http://rakhakorsana.wordpress.com, pada tanggal 29 Oktober 2013.

Serikat tidak masuk ke wilayah Vietnam Utara, mereka hanya memerangi tentara Vietnam Utara yang masuk ke perbatasan. Pertengahan 1964, 56.000 orang tentara Vietnam Utara menyerang perbatasan Vietnam Selatan, termasuk menyerang kapal-kapal perang Amerika Serikat di Teluk Tonkin. Amerika menanggapi perang ini lebih serius lagi. Secara total, Amerika Serikat mengirimkan lebih dari 500.000 orang prajuritnya untuk membantu Vietnam Selatan. Sejumlah negara sekutu Amerika Serikat juga ikut terlibat.

Setidaknya Amerika "terpaksa" terlibat lebih dalam di Perang Vietnam ini, manakala kekuatan udara yang bermarkas di Jepang dilibatkan untuk bergerak maju dan menyerang sasaran di Utara. Diawali pengerahan kekuatan udara dan pangkalan di Okinawa, Jepang untuk bergerak maju ke Danang, Vietnam Selatan pada 31 Januari 1965, Amerika mulai melibatkan jet tempur jenis F-105. Pengerahan kekuatan udara dari *Tactical Fighter Wing* ke-18 ini menunjukan kekhawatiran Amerika Serikat dalam menghadapi Vietnam Utara yang bersemangat bergerak ke Selatan.[4]

---

[4] "Perang Vietnam: Sejarah Perang Berlarut yang Mematikan", diakses dari [illegible] pada tanggal 29 Oktober 2013

Gambar 1.3 Pesawat Tempur Amerika Serikat Dalam Operasi Militer Di Vietnam

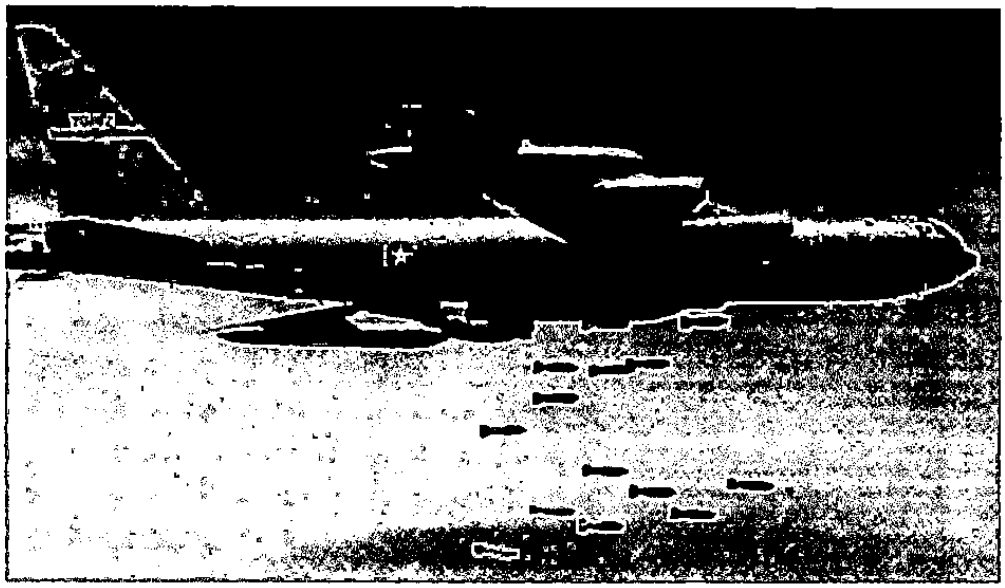

Kehebatan Perang Vietnam juga ditunjukkan oleh beragam persenjataan yang digunakan kedua belah pihak. Dari persenjataan primitif hingga bom udara canggih digunakan untuk menjebak, membunuh dan mengalahkan musuh. Sangat tidak seimbang bila dilihat dari persenjataan antara pihak Utara dan pihak Selatan namun dari semangat justru faktor ini yang menentukan. Terbukti Amerika Serikat meninggalkan Vietnam dan Tentara Vietnam Utara dapat melenggang masuk ke Selatan.

Perang ini akhirnya mempertemukan perwakilan dari Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di Paris pada tahun 1968. Di bawah Pemerintahan Nixon, Amerika Serikat mengajak perwakilan dari *The National Liberation Front* (NLF) untuk berunding.

Lamanya perang di Vietnam, banyaknya anggaran Militer Amerika Serikat serta banyaknya korban jiwa membuat banyak warga Amerika

Serikat menjadi kontra dengan Pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, politisi yang di pimpin oleh beberapa Senator, demonstrasi oleh warga Amerika Serikat serta kritikan di berbagai kampus di Amerika Serikat membuat Pemerintahan Amerika Serikat memikirkan ulang keberadaan Militer Amerika Serikat di Vietnam.

Henry Kissinger menjadi perwakilan Amerika Serikat pada negoisasi dengan Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan NLF di Paris. Pada tahun 1973, perjanjian yang kemudian dikenal dengan *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO) ditandatangani oleh Amerika Serikat, Vietnam Selatan, Vietnam Utara dan NLF.

Kerugian secara ekonomi dan banyaknya tentara Amerika Serikat yang meninggal di Vietnam akhirnya membuat Kongres Amerika Serikat menarik pasukannya dari Vietnam. Amerika Serikat menutup kedutaan dan mengevakuasi semua personel kedutaan sesaat sebelum penyerahan Vietnam Selatan kepada pasukan Vietnam Utara. Vietnam pada akhirnya bersatu di bawah kekuasaan komunis.[5]

Pada akhirnya, Vietnam Selatan kalah hingga akhirnya pasukan Vietnam Utara menguasai Saigon pada pertengahan tahun 1975. Pada tahun 1976, negara Vietnam dibentuk ulang dan Saigon diganti namanya menjadi Ho Chi Minh City.

Kemenangan berbasis komunis Vietnam Utara yang berhasil menguasai wilayah selatan dan berhasil mengusir pasukan Amerika

---

[5] "*A Guide To The United States History Of Recognition, Diplomatic, And Consular Relations, By Country, Since 1776: Vietnam*" diakses dari http://history.state.gov pada tanggal 20 Januari 2013

Serikat dari Vietnam menjadi legitimasi untuk menerapkan komunisme secara penuh dalam Politik Vietnam. Sebagai negara sosialis yang menganut sistem satu partai, Pemerintahan Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan. Termasuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri, Partai Komunis Vietnam (PKV) sebagai partai tunggal memegang posisi penting untuk menentukan haluan dalam hubungan luar negeri Vietnam.

Penarikan Kedutaan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan pasca kemenangan Vietnam Utara (Komunis) secara tidak langsung telah memutuskan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Amerika Serikat yang sebelumnya telah memberi bantuan ekonomi dan militer kepada Pemerintah Vietnam Selatan menghentikan segala bentuk dukungannya kepada Pemerintah Vietnam. Amerika Serikat memberlakukan embargo bahan pangan, ekonomi dan senjata. Hal ini menyebabkan Vietnam mengalami kemunduran ekonomi. Keterpurukan ekonomi akibat peperangan di masa lampau mempengaruhi elit pembuatan kebijakan Vietnam untuk melakukan perubahan dalam sistem perpolitikan.

Pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam (PKV) melaksanakan Kongresnya yang keenam di Hanoi. Hal ini menjadi perubahan mendasar dalam perpolitikan Vietnam karena dalam momentum tersebut dihasilkan sebuah keputusan yang dikenal sebagai "Doi Moi" atau Kebijakan Renovasi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh kepentingan nasional Vietnam dan konstelasi politik internasional yang mengalami

perubahan. Kondisi Vietnam yang saat itu secara politik dan ekonomi terisolasi dapat berpotensi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Rapuhnya ekonomi domestik dan kuatnya kekuasaan politik partai komunis tentu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Vietnam terutama jika dihadapkan dengan tantangan globalisasi.

Keterbukaan dan perluasan hubungan dengan dunia luar merupakan hal yang penting bagi Vietnam karena akan memberi peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pertahanan. Keterbukaan Vietnam kepada pihak asing memberi kesempatan bagi Amerika Serikat untuk mencoba memulai kembali hubungan diplomatik dengan Vietnam. Perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat pada 1992, memberikan pengaruh yang penting dalam rekonstruksi paradigma keamanan Vietnam. Bagi Vietnam saat ini, keamanan tidak lagi dilihat sebatas ancaman pada ideologi negaranya tetapi ancaman yang perlu dipertimbangkan adalah kemiskinan, kekurangan pangan, dan keterbelakangan. Maka keterbukaan perlu diterapkan terutama dalam hal ekonomi meskipun tanpa mengabaikan kekuatan sistem politik sosialis.

Dalam hal ini, Vietnam perlu melihat bagaimana Cina bisa bertahan dan semakin maju dengan ideologi negara yang sama, sosialis-komunis, namun juga terbuka terhadap ekonomi dan perdagangan dunia. Maka para politbiro PKV pada awal 1990-an membuat keputusan untuk memberi

ekonomi. Sejak saat itu, perekonomian Vietnam lebih terbuka terhadap investasi asing dengan masuknya bantuan dan perusahaan asing serta maksimalisasi perdagangan dengan negara lain. Sebagai contohnya perusahaan-perusahaan global mengincar Vietnam untuk meluaskan sayap bisnisnya, mulai dari perusahaan raksasa semikonduktor Intel sampai rumah busana Victoria's Secret. Keberadaan perusahaan trans-nasional tersebut membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Vietnam meskipun hanya dengan menjadi pekerja pabrik.[6]

Pada tahun 1995, Amerika Serikat mengumumkan secara resmi normalisasi hubungan diplomatik dengan Vietnam. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan resmi dari Perwakilan Amerika Serikat ke Vietnam. Pada tanggal 12 Juli 1995 Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Mantan Perdana Menteri Vietnam, Vo Van Kiet telah menyatakan menormalisasi hubungan diplomatik, meletakkan tonggak penting bagi hubungan dua negara Vietnam dan Amerika Serikat.[7] Sejak saat itu, hubungan antara dua negara terus mencapai kemajuan-kemajuan besar di atas jalan kerjasama.

Hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam telah menjadi semakin kooperatif dan berbasis luas semenjak normalisasi. Hubungan ekonomi antara Amerika Serikat dan Vietnam berkembang. Vietnam adalah mitra dalam rezim non-proliferasi, termasuk inisiatif global untuk memerangi

---

[6] "Politik Luar Negeri Vietnam dalam Tantangan Globalisasi", diakses dari http://go-one-go.blogspot.com pada tanggal 29 Oktober 2013.

[7] "U.S. – Vietnam Relations", diakses dari http://vietnam.usembassy.gov pada tanggal 20 Januari

terorisme nuklir, dan mengambil keuntungan dari keahlian, peralatan, dan pelatihan yang tersedia di bawah Kontrol Ekspor dan Program Keamanan Perbatasan. Dengan dukungan dari *US Department of Energy Initiative Megaports*, Vietnam memasang peralatan deteksi radiasi untuk membantu mendeteksi dan mengidentifikasi senjata pemusnah massal dan komponen mereka di pelabuhan komersial Cai Mep-Vung Tau. Amerika Serikat dan Vietnam telah menandatangani kesepakatan kontra-narkotika.[8]

Perkembangan hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan Vietnam pasca dilakukannya normalisasi memberikan harapan tinggi bagi kedua negara. Untuk meningkatkan dan mempererat kembali hubungan kerjasama diantara kedua negara maka terbentuklah suatu Perjanjian Perdagangan Bilateral Amerika Serikat dengan Vietnam.

Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam-Amerika Serikat atau BTA (*Vietnam-America Bilateral Trade Agreement*) pada tanggal 10 Desember 2001 merupakan satu naskah hukum penting yang menciptakan dasar hubungan ekonomi antara dua negara yang kuat. Hal ini mengingat riwayat hubungan dimasa lampau yang memiliki riwayat konflik begitu panjang. Hingga saat penandatanganan dan pemberlakuan secara resmi BTA pada tanggal 10 Desember 2001, kedua belah pihak harus memakan waktu bertahun tahun untuk melakukan perundingan dan

Penandatanganan BTA tersebut juga merupakan salah satu hasil dari peninjauan hubungan perdagangan yang telah mengalami peningkatan pesat. Menurut statistik dari kedua pihak Vietnam dan Amerika Serikat, Amerika Serikat dengan cepat telah menjadi pasar ekspor yang besar dari Vietnam hanya setelah dua tahun pelaksanaan BTA. Amerika Serikat tercatat sebagai lima investor terbesar di Vietnam. Hubungan bilateral kedua negara meningkat lebih dari US$ 7,6 miliar tahun 2005. Jumlah itu lima kali lipat sejak kesepakatan perdagangan kedua negara dicapai empat tahun sebelumnya.

Setelah 10 tahun sejak perjanjian BTA berlaku, perdagangan bilateral Vietnam-Amerika Serikat telah meningkat lebih dari 1.200 persen, yaitu dari US$ 1,5 milliar menjadi lebih dari US$ 20 milliar. Di antara semua jenis komoditas ekspor pokok dari Vietnam ke Amerika Serikat, tekstil dan produk tekstil tetap menjadi jenis komoditas yang mempunyai nilai ekspor terbesar, disusul dengan barang-barang dari kayu, barang-barang interior, alas kaki dan lain-lain. Impor Vietnam dari pasar Amerika Serikat juga meningkat drastis dengan hampir semua jenis komoditas impor seperti permesinan, peralatan mekanik, suku cadang, pakan ternak dan lain-lain yang mencapai nilai perdagangan sedikit-dikitnya 20 persen.[9]

Menurut data statistik dari Departemen Perdagangan Vietnam dan Industri menyatakan pendapatan ekspor alas kaki pada tahun 2010 diperkirakan mencapai US$ 5,2 miliar. Pada pertengahan tahun total impor

alas kaki dari Vietnam lebih dari satu miliar dolas AS, naik 32,9%. Hal ini memperkuat bahwa jumlah alas kaki Vietnam menyumbang 28% dari total ekspor.[10]

Pada tahun 2011, walaupun ekonomi Vietnam terkena pengaruh akibat inflasi ekonomi dunia, tetapi dengan usaha yang serius dari Pemerintah Vietnam serta sokongan yang aktif dari seluruh rakyat dan badan usaha, maka Vietnam tetap dapat mempertahankan kestabilan dan telah mencapai perkembangan yang positif. Aktivitas ekspor-impor mencapai hasil yang tinggi, jauh melampaui skala ekspor. Total nilai ekspor pada tahun 2011 diprakirakan mencapai 96,3 miliar USD, naik kira-kira 33 persen terbanding dengan masa yang sama tahun lalu.[11]

Dalam perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Vietnam ternyata selain bidang perdagangan, Amerika Serikat juga berupaya memacu hubungan politik dan militer dengan Vietnam menyusul pemulihan hubungan diplomatik dengan Vietnam tahun 1995, setelah 20 tahun berakhirnya perang Vietnam. Sejumlah analis menilai langkah ini sebagai bagian strategi Amerika Serikat guna membendung pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara dan untuk menggalang aliansi militer yang baik dengan negara di sekitar Cina.

---

[10] "Produk alas kaki Vietnam, Amerika Serikat terus menjadi importir terbesar dari 40", diakses dari http://id.prmob.net pada tanggal 19 Maret 2013

[11] "Berusaha mencapai nilai produksi industri sebanyak 13% pada tahun 2012", diakses dari http://vovworld.vn pada tanggal 19 Maret 2013

C. Pokok Permasalahan

Apa kepentingan Amerika Serikat dalam menormalisasi hubungan perdagangan dengan Vietnam?

D. Landasan Teori

1. Politik Luar Negeri

Untuk memperoleh status hegemoni yang memberikan sumbangsih sangat besar terhadap aspek-aspek kepentingan nasional tersebut, secara eksternal diperoleh melalui politik dan atau kebijakan luar negeri. Politik luar negeri diperlukan sebagai strategi untuk mengatur hubungan dengan negara lain demi kepentingan internal. Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai sebuah reaksi atas inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pelaksanaan kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Jack C. Plano dan Roy Olton mengungkapkan apa yang dimaksud kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya mencapai kepentingan nasional.[12]

Kepentingan nasional secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait hubungan pemerintah dengan rakyatnya sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional. Amerika Serikat melakukan normalisasi dan peningkatan hubungan perdagangan bilateral dengan Vietnam merupakan salah satu Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Amerika Serikat sebagai strategi untuk mengatur hubungannya dengan Vietnam demi kepentingan internal Amerika Serikat sendiri untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Secara teoritis, menurut G. Jonh Ikenberry pada konteks Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam menjalin hubungan dengan negara lain di dunia terdapat empat *framework* (4P) utama yang dikenal

---

[12] Jack C. Plano and Roy Olton, *The Internasional Relation Dictionary*, Western Michigan

sebagai kerangka kerja Politik Luar Negeri Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu sebagai berikut:[13]

1.1. Principles (Prinsip)

Prinsip itu meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Untuk prinsip ini, Politik Luar Negeri Amerika Serikat utamanya untuk menyebarkan akar-akar idealisme demokrasinya ke seluruh dunia. Oleh para pemikir Amerika yang melahirkan demokrasi seperti Thomas Jefferson,

> " ... hanya bentuk pemerintahan republik yang demokratis yang menghargai hak asasi manusia ... "

berarti demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang perlu dijaga dan dikembangkan di dunia. Dalam konteks ini, tindakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari upaya penyebarluasan prinsip-prinsip negaranya keseluruh dunia.[14]

Amerika Serikat ingin menerapkan Pemerintahan Demokrasi di Negara Vietnam yang sebagian mayoritas warga negaranya menganut Paham Komunis. Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian suatu negara diperlukan liberalisme yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk menjalankan kegiatan perekonomian di negaranya. Selain itu, Amerika Serikat mengharapkan kepada setiap negara yang menjalankan pemerintahan

---

[13] G. Jonh Ikenberry, *American Foreign Policy Theoretical Essay*, Edisi ke-4, (New York: W.W. Norton dan Compagny, Inc., 2007), hal. 8.
[14] Ibid. hal 9-15.

yang demokratis dapat lebih menghargai Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, Amerika Serikat dapat mengurangi pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi di Vietnam.

1.2. Prosperity (Kemakmuran)

Politik Luar Negeri Amerika Serikat, utamanya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam motifasi ini, terdapat beberapa kepentingan ekonomi dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat, diantaranya:

a. Kebijakan-kebijakan untuk membantu menurunkan tarif impor dalam hubungan dagangnya dengan negara lain.
b. Menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika Serikat.
c. Penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Amerika Serikat.
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik dan lain-lain.

Banyak teori yang menekankan bahwa penekanan utama Politik Luar Negeri Amerika Serikat adalah faktor-faktor ekonomi. Secara umum, penekanan ekonomi dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat dibagi dalam dua prinsip. *Pertama,* Politik Luar Negeri Amerika Serikat ditekankan untuk mencapai keuntungan ekonomi bagi Amerika Serikat. Indikatornya adalah keseimbangan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi makro ekonomi yang sehat. Untuk

mencapai tujuan ini, dalam memasuki abad ke-21 Politik Luar Negeri Amerika Serikat menekankan efektifitas lembaga-lembaga internasional yang dirancangnya untuk meningkatkan keuntungan ekonominya seperti *International Monetary Found (IMF), World Trade Organization (WTO), dan World Bank.* Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa eksistensi dari ketiga lembaga ini adalah dalam rangka untuk menjalankan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dalam mencapai *prosperity.*

Kedua, politik global Amerika Serikat dalam kerangka *prosperity* banyak didominasi oleh kelompok kapitalis dan elit-elit yang lain seperti *Multinational Corporations* (MNC) dan bank-bank besar yang bekerja dalam ruang lingkup global. Prinsip yang kedua ini, singkat kata dapat dikatakan sebagai politik kolonialisasi dan imperialisasi gaya baru terhadap negara-negara lain.

1.3. Peace (Perdamaian)

Secara prinsip, Amerika Serikat memposisikan diri sebagai penjaga keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjalanan sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika Serikat. Untuk mewujudkan perdamaian, Amerika Serikat tidak segan-segan untuk mengumandangkan perang. Dalam Politik Luar Negeri Amerika Serikat, ini lebih dikenal dengan istilah "perang

1.4. Power (Kekuasaan)

Power adalah syarat kunci dalam merumuskan dasar tujuan Amerika Serikat menguasai dunia, pertahanan diri, pemeliharaan kemerdekaan dan teritorial nasional. *Power* mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya agresi dan penting untuk menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. *Power* merupakan kunci utama untuk memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan yang kredibel. *Power* memungkinkan aktor untuk membentuk sesuai dengan refleksi kepentingannya. *Power* juga memungkinkan Amerika Serikat untuk memelihara keamanan, menangkis dan menaklukkan setiap ancaman terhadap keamanan negara. *Power* bisa mendesak justifikasi penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks *power*, Amerika Serikat masih menggunakan pendekatan pandangan-pandangan realis.

Seperti halnya Amerika Serikat berupaya menjaga stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan dengan cara menggandeng Vietnam sebagai mitranya seperti pada latihan militer bersama di Laut Cina Selatan. Latihan ini digelar beberapa pekan setelah Vietnam dan Cina terlibat sengketa wilayah di perairan tersebut pada bulan Juli 2011. Para pejabat Amerika Serikat dan Vietnam menegaskan bahwa latihan ini adalah bagian dari kegiatan rutin yang telah lama direncanakan.[15]

Vietnam dan Amerika Serikat setuju memperluas kerjasama pertahanan di lima bidang utama, mulai dialog tingkat tinggi hingga

---

[15] "AS dan Vietnam gelar latihan militer", diakses dari http://www.bbc.co.uk pada tanggal 22

bantuan bencana. Khususnya kerjasama dalam mengatasi akibat pasca perang juga mendapat banyak perhatian dari kedua pihak dan telah mencapai banyak hasil. Kelima hal itu yang dirinci menjadi kerja sama keamanan maritim, operasi pencarian dan penyelamatan, operasi penjaga perdamaian, dan bantuan kemanusiaan, menjadi materi pertemuan Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, ke Hanoi pada 5 Juni 2012. [16]

Dalam pertemuan kembali Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Vietnam pasca dua dekade diberlakukannya BTA, kedua negara mengembangkan kerjasama dan koordinasi yang efektif di forum-forum regional dan internasional, khususnya Forum Ekonomi Asia – Pasific (APEC), Forum Keamanan Asia (ARF), Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS), Konferensi Menteri Pertahanan yang diperluas (ADMM+), dll.[17]

Dari keempat prinsip dalam tataran teoritis di atas dalam konteks menjalin hubungan bilateral dengan Vietnam, Politik Luar Negeri Amerika Serikat lebih menekankan kepada *principles* dan *prosperity*. Dua kerangka kerja Politik Luar Negeri Amerika Serikat tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Vietnam selaras dengan

---

[16] "Vietnam-Amerika Serikat berikrar tingkatkan kerja sama pertahanan", diakses dari http://www.antaranews.com pada tanggal 11 Juni 2013.

[17] [illegible]

situasi dan kondisi hubungan diplomatik yang sekarang telah terjalin diantara kedua negara tersebut. Hal inilah yang menjadi landasan bagi para Pemimpin Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negeri dan menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain termasuk di Vietnam. Meskipun kebijakan yang diambil masing-masing presiden dikemas dengan tampilan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya politik maupun kebijakan luar negeri yang diterapkan tetap akan bersandar pada kerangka kerja Politik Luar Negeri Amerika Serikat. Tidak terkecuali dengan politik luar negeri yang dijalankan Amerika Serikat terhadap Vietnam juga dimaksudkan untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat.

2. Kepentingan Nasional

Secara fundamental dapat ditelaah bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh negara baik dalam skala internal maupun eksternal dilakukan dengan tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengejar, memperoleh, dan mempertahankan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Kepentingan nasional tidak dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan sumberdaya-sumberdaya internal. Diperlukan kombinasi dan sinerji yang kuat diantara berbagai sumberdaya internal dan eksternal suatu negara.

Sebelum menjelaskan mengenai landasan teori kepentingan nasional, namun terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang definisi normalisasi. Definisi normalisasi menurut kamus politik internasional adalah:[18]

a. Tindakan yang dilakukan untuk mengembalikan hubungan antara negara kepada hubungan yang normal.
b. Usaha untuk membuka kembali hubungan antara negara yang semula diputuskan.

Amerika Serikat pada awalnya mempunyai konflik dengan Vietnam. Konflik ini dimulai dari perpecahan Negara Vietnam menjadi dua bagian yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Amerika Serikat tidak mengakui Pemerintahan Vietnam Utara dan mendukung Pemerintah Vietnam Selatan sehingga menyebabkan terjadinya perang selama 20 tahun. Perang ini berakhir setelah kekalahan pasukan Vietnam Selatan di bawah Vietnam Utara dan penarikan personel Kedutaan Amerika Serikat di Vietnam Selatan dan Vietnam kembali bersatu.

Pada tahun 1978, Vietnam menginvasi perbatasan Kamboja dan pada tahun ini Amerika Serikat berupaya untuk melakukan normalisasi dengan Vietnam. Hubungan normalisasi ini didasarkan pada penarikan militer Vietnam dari Kamboja. Di tahun 1995, Amerika Serikat

[18] [illegible] Jakarta, 1993, hal. 111

mengumumkan normalisasi resmi hubungan diplomatik dengan Vietnam.[19]

Normalisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan upaya Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional yang dimilikinya. Normalisasi dapat menjadikan hubungan antara Amerika Serikat dengan Vietnam menjadi lebih baik. Normalisasi tersebut pada akhirnya menjadi sarana bagi Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama dengan Vietnam yang berujung pada pemenuhan kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat.

Konsep kepentingan nasional merupakan konsep yang popular dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Kepentingan nasional dapat dijadikan alasan suatu negara untuk mengambil suatu kebijakan luar negerinya.

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan kepentingan utamanya, termasuk di dalamnya hak untuk mempertahankan stabilitas politik, kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan dan kesejahteraan ekonomi.[20]

---

[19] Loc.cit.

[20] Jack, C. Plano and Roy Olton, *The Internasional Relation Dictionary*, Western Michigan University, California, 1980. Hal.9.

Status hegemoni yang telah diraih Amerika Serikat saat ini memberikan sumbangsih yang sangat signifikan dan esensial bagi kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan hegemoni yang diraihnya, Amerika Serikat dapat melanggengkan kekuasaannya dalam percaturan global. Hegemoni yang melekat pada identitas Amerika Serikat akan memberikan kemudahan bagi upaya pelestarian eksistensi diberbagai bidang vital penyelenggaraan negara seperti ekonomi, politik, keamanan, bahkan ideologinya agar tetap berada pada lini terdepan dunia.

Dari telaah tentang Amerika Serikat sebagai negara hegemoni penguasa dunia dan hegemoni untuk kepentingan nasional di atas, dapat dikatakan bahwa antara hegemoni dan kepentingan nasional terdapat sinerji yang teramat kuat. Dengan hegemoni yang diraihnya, dapat menjadi jalan utama Amerika Serikat untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Sedangkan hegemoni yang diraih Amerika Serikat adalah sumbangan yang sangat berarti terhadap kepentingan nasional.

E. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan dan penjelasan teori di atas maka penulis menarik kesimpulan sementara bahwa kepentingan Amerika Serikat mengambil kebijakan dalam menormalisasi hubungan perdagangan dengan Vietnam melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral antara lain:

(1) Pemerintah Amerika Serikat ingin menyebarkan paham demokrasi di Vietnam.

(2) Amerika Serikat membutuhkan akses baru dalam pemasaran di Kawasan Asia Tenggara khususnya melalui Vietnam.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang penulis gunakan dalam menganalisa masalah diatas yaitu dengan batasan waktu dimulainya normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Vietnam di tahun 1990-an kemudian diadakannya penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bilateral Vietnam-Amerika Serikat atau yang biasa dikenal dengan istilah BTA (*Bilateral Trade Agreement*) yang resmi diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2001 dan sampai dengan sekarang. Jangkauan penelitian dengan batasan waktu tersebut tidak mengabaikan kejadian yang ada sebelum dan sesudahnya, selama hal ini masih memiliki relevansi dengan masalah diatas.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan teori yang pernah penulis dapat pada saat di bangku kuliah untuk menganalisa masalah yang ada di dunia internasional, khususnya untuk mengetahui alasan yang sebenarnya dari kepentingan

Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan bilateral Amerika Serikat dan Vietnam.

2. Untuk menambah wawasan mahasiswa mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat dan perkembangan hubungan luar negerinya dengan Vietnam.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi literatur. Untuk pengumpulan data yang diperlukan diperoleh dengan memanfaatkan sumber bahan data sekunder yang berupa sumber-sumber pustaka yaitu buku-buku, majalah, jurnal, artikel, berita baik cetak maupun elektronik, termasuk juga melalui internet. Laporan-laporan penelitian maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti juga menjadi sumber bahan data sekunder dari penelitian ini.

Metode Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif, yaitu menelaah secara mendetail terhadap data yang dikumpulkan dan kemudian dilakukan interpretasi.

Proses yang akan dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

   Data dikumpulkan dari berbagai referensi yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Setelah data terkumpul dan sudah memadai baru disusun, diolah secara sistematik. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang komperhensif sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Interpretasi Data

   Dalam proses ini maka berfungsi untuk memberikan pemaknaan terhadap data tersebut, memperjelas dan mencari hubungan antar konsep. Untuk menguji persepektif ini agar bisa mengarah pada kebenaran maka dilakukan *cross checking* antar data atau informasi yang diperoleh.

3. Penarikan Kesimpulan

   Setelah data yang diperoleh dan diinterpretasikan, dan dalam *cross checking* antar data juga sudah tidak mengalami keraguan, maka proses pencarian dan pengolahan data bisa dihentikan dan siap untuk diambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana kesinambungan dalam setiap bab akan diperjelas oleh sub-sub bab sehingga pada akhirnya akan membentuk karya ilmiah yang sistematis.

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II, menjelaskan sejarah dan hubungan bilateral Amerika Serikat dan Vietnam sebelum normalisasi.

Bab III, menguraikan tentang hubungan Amerika Serikat-Vietnam pasca normalisasi dan penandatanganan perjanjian perdagangan bilateral.

Bab IV, menguraikan tentang kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dalam menormalisasi hubungan perdagangan bilateral dengan Vietnam.

Bab V, adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab